

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan pendidikan dan juga pariwisata yang paling dituju di Indonesia. Daerah berbasis budaya yang sangat kental dimana di dukung dengan potensi alamnya yang sangat luar biasa. Provinsi ini terletak di bagian selatan pulau jawa dimana berbatasan langsung dengan provinsi jawa tengah bagian selatan di sebelah utara dan laut selatan jawa di bagian selatan, sehingga DIY memiliki garis pantai di sepanjang wilayah bagian selatan. DIY merupakan satu dari dua pusat kebudayaan jawa yang berpusat di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lima daerah administratif, yaitu Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul.

Kelima wilayah administratif ini memiliki potensi alam dan kepariwisataan yang khas karena selalu berkaitan dengan budaya jawanya. kabupaten Bantul khususnya, dimana Bantul merupakan salah satu wilayah administratif Yogyakarta yang terletak di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kulon Progo (barat),

Kabupaten Gunung Kidul (timur), Kota Jogja dan Kabupaten Sleman (utara) serta samudra Hindia (selatan). Kabupaten Bantul terletak antara 07 44' 04" - 08 00' 27" lintang selatan dan 110 12' 34"- 110 31' 08" lintang utara. Secara administrasi Kabupaten Bantul dibagi menjadi 17 wilayah kecamatan, yaitu: Bambanglipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kreteg, Pundon, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan.

Dimana terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki pantai sehingga Bantul memiliki objek wisata alam pantai yang cukup banyak yang sudah dirintis sejak lama, antara lain: pantai Parangtritis, pantai samas, pantai pandan simo dan beberapa obyekwisata lainnya. Obyek wisata pantai Parangtritis merupakan obyek wisata yang paling banyak di kunjungi dari seluruh Objek wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat di lihat dari data Retribusi & Kunjungan Obyek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2001-2007 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1. Tabel Pendapatan Objek Wisata di Bantul****Tahun 2013**

Tahun Anggaran APBD Tingkat II	Nama Objek Wisata	Target Pendapatan Satu Tahun (Rp)	Jumlah kunjungan (Orang)
2013	Parangtritis	7,642,150,000	1,769,505
	Pantai samas	90,000,000	59,620
	Pantai Goa cemara	150,000,000	79,331
	Pantai Pandansimo	250,992,000	129,055
	Pantai kwaru	450,000,000	145,842
	Goa Selarong	65,000,000	30,711
	Goa Cerme	25,000,000	15,505
	Tirta Tamansari	92,000,000	
	Penerimaan lain-lain :	235,785,000	
DIPARDA	Jumlah	9,000,000,000	2,229,569

Sumber : DIPARDA kabupaten Bantul

Dari tabel di atas dapat dilihat daftar jumlah pengunjung di objek pariwisata kabupaten Bantul tahun 2013 sebagai berikut : Parangtritis terdapat 1,769,505 pengunjung, Pantai Samas terdapat 59,620 penunjung, Pantai Goa Cemara terdapat 79,331 pengunjung, Pantai Pandansimo

terdapat 129,055 pengunjung, Pantai Kwaru terdapat 145,842 pengunjung, Goa Selarong sebanyak 30,711 pengunjung, Goa Cerme sebanyak 15,505 pengunjung, Tirta Tamansari tidak di ketahui jumlahnya,. Jumlah total pengunjung objek pariwisata kabupaten Bantul tahun pada tahun 2013 adalah 2,229,569 pengunjung.

Parangtritis merupakan objek pariwisata yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang tertinggi di banding dengan objek pariwisata lain di Kabupaten Bantul. Hal ini sebanding dengan jumlah pengunjung yang memasuki kawasan objek pariwisata ini. Pada tahun 2013 objek wisata Parangtritis telah memberi kontribusi pendapatan 79.36% dari total pendapatan seluruh objek wisata yang ada di kabupaten Bantul. Dengan total pendapatan Rp 7,642,150,000.

Dari semua objek wisata di kabupaten Bantul, pantai Parangtritis menempati urutan pertama objek pariwisata yang paling banyak di kunjungi wisatawan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.

**Tabel 1.2. Peringkat Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul**

No.	Objek wisata	Jumlah kunjungan
1.	Parangtritis	1,769,505
2.	pantai kwaru	145,842
3.	pantai pandan simo	129,055
4.	pantai goa cemara	79,331
5.	pantai samas	59,620
6.	goa selarong	30,711
7.	goa crème	15,505

Sumber : DIPARDA kabupaten Bantul

Dari tabel di atas dapat dilihat Parangtritis menduduki peringkat pertama lalu di ikuti jumlah kunjungan di pantai kwaru di urutan ke dua, di urutan ke tiga ada pantai pandan simo, lalu di urutan ke empat ada pantai goa cemara, di ikuti oleh pantai samas, goa selarong dan yang terakhir goa crème.

Parangtritis merupakan salah satu objek pariwisata terkenal di jogja dan merupakan icon utama pariwisata khususnya di kabupaten Bantul, selain karena termasuk wisata murah meriah Parangtritis juga memiliki daya pikat budaya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang dari 10 objek pariwisata terkenal di Yogyakarta:

**Tabel 1.3. Sepuluh Objek Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Berdasarkan Jumlah Wisatawan yang Datang  
Tahun 2010**

Objek wisata	Jumlah wisatawan
Pantai parantritis	1.367.882
Taman wisata candi prambanan	1.071.885
Wana wisata kaliurang	911.624
KRKB Gembira Loka	355.515
Kraton Yogyakarta	299.966
Pantai Baron, kukup dan sekitarnya	239.900
Purawisata	174.790
Pantai glagah	117.671
Candi sambisari	92.652
Kaliadem	68.105
Jumlah	4.699.990

Sumber : data statistikPariwisata DIY tahun 2010

Berdasarkan catatan dari BPS DIY, data statistic kunjungan pariwisata Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010, dari total pengunjung sebanyak 4.699.990. menunjukkan bahwa objek wisata Pantai Parantritis mendapat kunjungan sebanyak 1.367.882 wisatawan, objek wisata Taman Wisata Candi Prambanan di kunjungi 1.071.885 wisatawan, objek wisata Wana Wisata Kaliurang di kunjungi 911.624 wisatawan, objek wisata KRKB Gembira Loka di kunjungi 355.515 wisatawan, objek

wisata Kraton Yogyakarta di kunjungi 299.966 wisatawan, objek wisata Pantai Baron di kunjungi 239.900 wisatawan, objek wisata Purawisata di kunjungi 174.790 wisatawan, objek wisata Pantai Galagah di kunjungi 117.671 wisatawan, objek wisata Candi Sambisari di kunjungi 92.652 wisatawan, objek wisata Kaliaedem di kunjungi 68.105 wisatawan. Dari data yang di peroleh seperti di atas, dapat dilihat bahwa objek wisata pantai Parangtritis mendapat kunjungan wisatawan terbanyak di antara tempat wisata lainnya di Yogyakarta, yaitu 1.367.882 orang.

Objek Pariwisata Pantai Parangtritis terletak di kecamatan Ketek kabupaten Bantul yang terletak diantara 7°58'33" LS sampai dengan 8°2'26"LS dan diantara 110°25'15 BT sampai dengan 110°28'15'. Fenomena potensi pantai Parangtritis adalah salah satu obyek wisata pantai yang paling banyak menyita perhatian wisatawan, tidak hanya sebagai tujuan wisata alamnya saja melainkan juga menjadi tujuan wisata religi dan budaya.

Objek wisata Parangtritis dapat dikatakan sebagai objek wisata yang sangat unik di banding objek wisata pantai yang lain, hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Parangtritis merupakan daerah multi wisata, karena memiliki banyak potensi yang menarik bagi pengunjung, antara lain:
  - a. Objek wisata alam (pantai, gua, sendang parang wedang, *gumuk* pasir).

- b. Objek wisata sejarah (makam syeh maulana maghribi, makan Syeh Bela Belu, gua peratapan raja, situs parang kusumo).
  - c. Objek wisata budaya (upacara labuhan keraton, upacara Peh Cun, lomba layang-layang).
  - d. Objek wisata kuliner (sea food pantai depok, makanan peyek jengking).
  - e. Objek wisata religious (ziarah ke makam dan petilasan parang kusumo dan wali).
2. Parangtritis juga menyimpan sejumlah keunikan (keanehan) yang jarang di temukan di daerah lain. Seperti: gumuk pasir, fenomena air tawar di tepi pantai, fenomena sumber air panas parang wedang yang tidak mengandung belerang. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi generasi muda maupun akademi karena dapat di jadikan objek penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Seluruh potensi wisata di Parangtritis masih alami. Belum banyak campur tangan selera modern sehingga pengunjung masih dapat menemukan nilai serta rasa aroma dunia kebudayaan jawa yang kental.



4. Diyakini sebagai pusat kekuatan dan asal muasal kerajaan Mataram. Dimana ada legenda pernikahan Sultan Agung Pertama dengan Ratu Pengusa pantai selatan Nyi Roro Kidul.

Data yang didapat dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten Bantul antara tahun 2001 sampai dengan 2007 meunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan pantai Parangtritis.

**Tabel 1.4. Data Kunjungan Wisatawan Pantai Parangtritis**

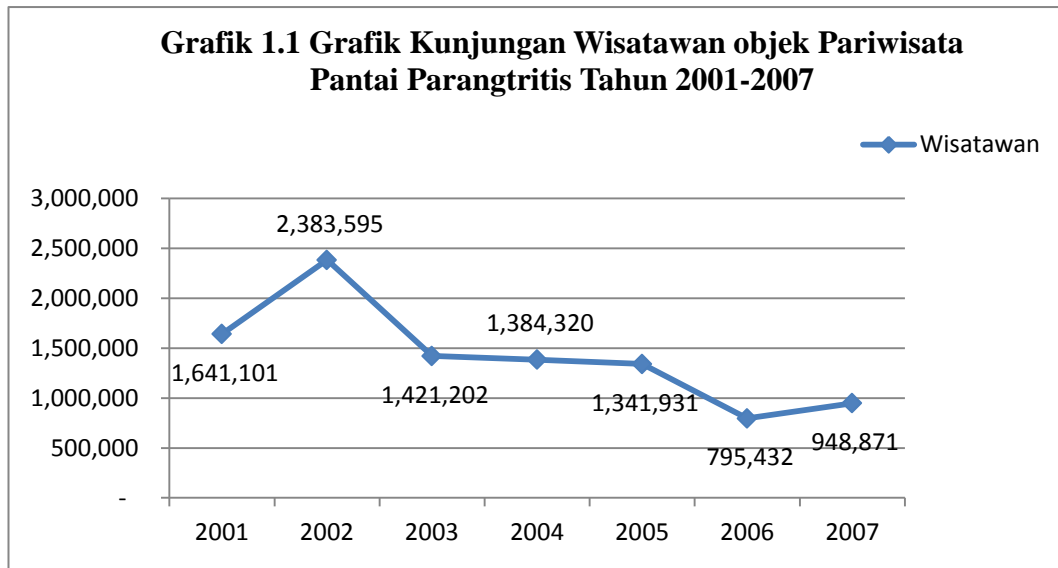
**Tahun 2001-2007**

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2001	1.641.101
2.	2002	2.383.595
3.	2003	1.421.202
4.	2004	1.384.320
5.	2005	1.341.931
6.	2006	795.432
7.	2007	948.871

Sumber: Diparda, Kabupaten Bantul, 2007

Dari tabel diatas dapat di lihat data jumlah kunjungan obyek pariwisata pantai Parangtritis dari tahun 2001-2007 yang dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2001 jumlah pengunjung sebanyak 1.641.101, pada tahun 2002 sebanyak 2.383.595 pengunjung, pada tahun 2003 sebanyak 1.421.202 pengunjung, pada

tahun 2004 sebanyak 1.384.320 pengunjung, pada tahun 2005 sebanyak 1.341.931 pengunjung, pada tahun 2006 sebanyak 795.432 pengunjung, pada tahun 2007 sebanyak 948.871 pengunjung.



Dari grafik diatas dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun yaitu antara tahun 2002 – 2006 terdapat kecenderungan penurunan pengunjung yang signifika. Kecenderungan penurunan kunjungan wisatawan secara riil telah terjadi sejak 2004 setelah gelombang tsunami melanda Aceh, kemudian di perparah dengan dampak peristiwa gempa bumi tanggal 27 mei 2006 yang menyebabkan gelombang pasang di pantai selatan dan pengaruh bencana gelombang tsunami di pangandaran pada bulan juli 2006.

Faktor lain menurunnya jumlah kunjungan di kawasan objek wisata Parangtritis adalah kondisi fisik pantai yang semakin kumuh dan sebagian kawasan menjadi lahan praktek prosritusi. Dalam kaitanya dengan hal itu, Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi, menyatakan

bahwa, di kawasan pantai selatan itu kandungan bacteria E-coli sudah diambang batas karena kesehatan lingkungan yang tidak mendapat perhatian (annihayah, 2008: 21).

Selain itu, dari catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, menunjukkan terdapat 110 perempuan Pekerja Seks Komersial yang tinggal di Parangtritis. Penyebaran PSK di Dusun Mancingan terdapat di dua wilayah, yaitu 70 orang di Parangkusumo dan 40 orang di Parangbolong. Rata-rata PSK tinggal di rumah-rumah penduduk .

Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah kabupaten Bantul melancarkan sebuah program penataan kawasan Parangtritis yang di atur dalam perda kabupaten Bantul No. 4 tahun 2004 tentang rencana umum tata ruang wilayah kabupaten Bantul yang diperjelas dalam Keputusan Bupati Bantul No.127 Tahun 2004 tentang Rencana teknis objek wisata Parangtritis, yang ditinjau kembali pada tahun 2007 yaitu Rencana teknis objek wisata Parangtritis tahun 2007.

Penyusunan studi peninjauan kembali Rencana Teknis Objek Wisata Kawasan Pangtritis bertujuan untuk

1. Meningkatkan kualitas fisik dan lingkungan objek wisata kawasan Parangtritis, meliputi tataruang, tata guna lahan, tata bangunn arsitektur, serta melaksanakan detail perhitungan pembiayaan.

2. Mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan terhadap sumberdaya yang ada di objek wisata kawasan Parangtritis melalui kegiatan pengembangan yang bersifat teknis.
3. Meningkatkan iklim investasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Saat ini kebijakan RTOW Kawasan Paragtritis sudah di implementasikan selama 11 tahun. Sudah dapat di pastikan kebijakan ini sudah memiliki *out put* yang nyata. Dari *implementasi* yang ada, penulis tertarik pada bagaimana rencana strategis, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terutama pada efektivitas kinerja kibijakan tersebut. Untuk mengetahui hasil dan tolak ukur keberhasilan sebuah kebijakan yang perlulah dilakukan suatu analisa evaluasi efektivitas kebijakan. Karena pada hakikatnya suatu kebijakan yang telah di terapkan pastilah diharapkan memiliki hasil *out put* yang positif.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi kebijakan/program/kegiatan kebijakan penataan kembali kawasan objek pariwisata Pantai Pangtritis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan bagaimana hasil evaluasi kebijakan/program/kegiatan kebijakan penataan kembali kawasan objek pariwisata Pantai Pangtritis.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritik.**

Penelitian ini diharapkan dapat untuk menerapkan berbagai teori-teori evaluasi kebijakan dalam menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik sekala daerah maupun skala nasional.

#### **2. Manfaat praktik.**

##### **a. Masyarakat.**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak.

b. Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Stakeholder khususnya di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantul.

c. Akademisi.

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk penelitian berikutnya

## **E. Landasan Teori**

### **1. Kebijakan Publik.**

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian

kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Menurut Rian Nugraha D ; 2003, kebijakan publik adalah jalan menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Kebijakan publik dapat ditempatkan sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional”. Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa:

- a. Kebijakan publik mudah untuk dipahamai, karena maknanya adalah hal-hal yang di kerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur karena ukuranya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di tempuh.

Namun, bukan berarti kebijakan publik mudah untuk dibuat, mudah untuk dilaksanakan, dan mudah untuk dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut faktor politik.

Carl I. Friedrick dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang sejalan dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :



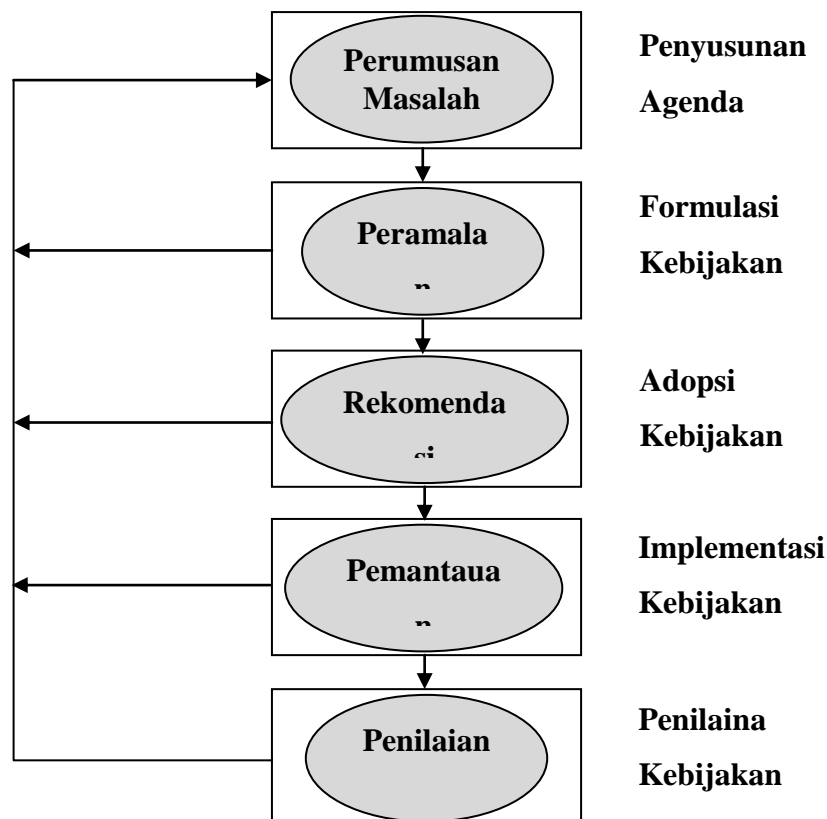
**Tabel 1.5 Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan.**

Fase	Karakteristik
Tahap penyusunan agenda.	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda public. Banyak masalah tidak di setuh sama sekali, sementara lainnya di tunda untuk waktu yang lama.
Tahap formulasi kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternative kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislative.
Tahap adopsi kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, consensus di antara dirut lembaga, atau keputusan peradilan.
Tahap implementasi kebijakan	Kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
Tahap penilaian kebijakan.	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan, eksekutif, legislative dan peradilan memenuhi persaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sumber: William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal.24

Menurut Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik Dunn



Sumber : William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta;

Gajah Mada University Press, Hal.25

Menurut subarsono(2008 : 8), Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwasannya analisis kebijakan publik bahwasannya adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan

(*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Menurut Harold Lasswell, (dalam Wiliam Dunn 1988:9) Analisa kebijakan dapat di fahami sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan mengenai dan di dalam proses kibijaksanaan.

Menurut Wiliam Dunn (1988:10) Tujuan analisa kebiakan sepanjang sejarahnya adalah untuk menyediakan kepada para pengambil keputusan, informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan problem-problem praktis.

## **2. Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang di laksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. ([www.slideshare.net](http://www.slideshare.net))

Kegiatan adalah realisasi dari program kebijakan yang berisi tindakan dan kegiatan. Dilaksanakan oleh level birokrasi berupa pelaksanaan program di lapangan.

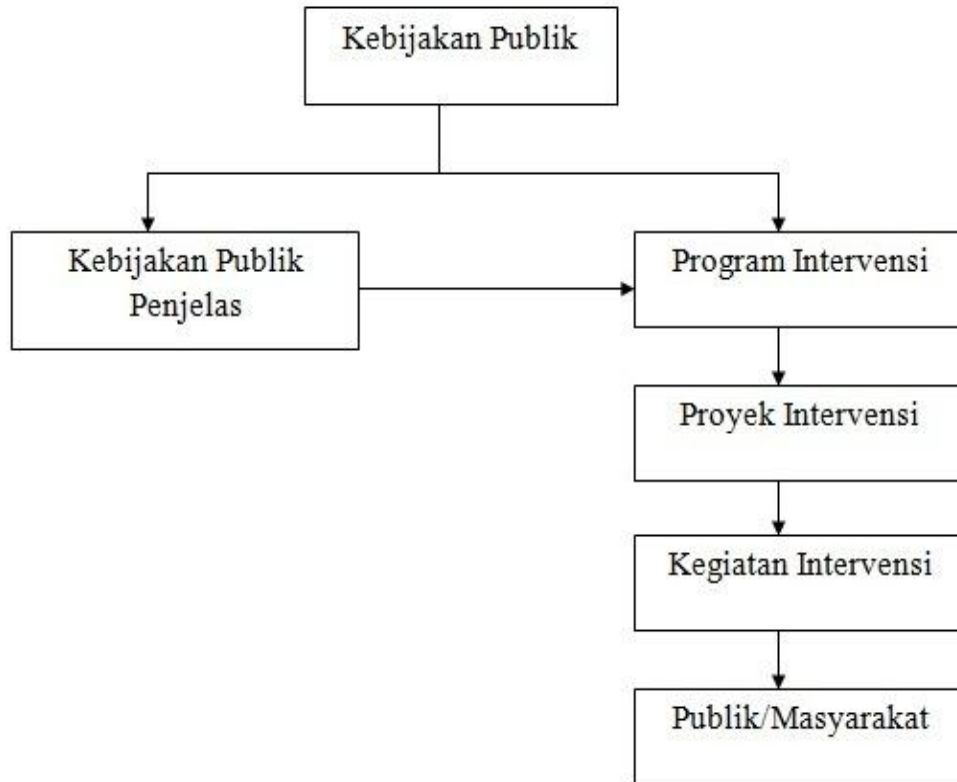
### **3. Implementasi kebijakan.**

#### **a. Pengertian implementasi kebijakan**

Menurut Riant Nugroho (2009, 494-495), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004;158)

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar. 1.2 Rangkaian Kebijakan Publik**



*Sumber : Riant Nugroho (2004:159)*

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. (materiibelajar.blogspot.co.id )

#### **4. Evaluasi kebijakan.**

##### **a. Pengertian evaluasi.**

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009) Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.

Viviane dan Gilbert de Lansheere (dalam Inggit Kurniawan, 2009) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Zulharman (2007) Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program

Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen -

komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak (Edison, 2009).

Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program

b. Tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan.

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1) Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2) Kepatuhan.

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3) Audit.

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan

4) Akunting.

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut



Beberapa ahli juga mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari evaluasi, Subarsono merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.

Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.

- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.

Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan.

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Oleh karena itu Evaluasi kebijakan menurut samodra, dkk(1994) dilakukan untuk mengetahui:

- 1) Proses pembuatan kebijakan.
- 2) Proses implementasi.
- 3) Konsekuensi kebijakan.
- 4) Efektifitas dampak kebijakan.

c. Kriteria Evaluasi Kebijakan.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi, William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas :

- 1) Efektifitas (*effectiveness*).

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat

berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2) Efisiensi (*efficiency*).

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3) Kecukupan (*adequacy*).

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4) Perataan (*equity*).

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-

kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.

5) Responsivitas (*responsiveness*).

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan (*appropriateness*).

Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Sejalan dengan kriteria rekomendasi kebijakan tersebut,

Dunn mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan antara lain :

**Tabel 1.6. Kriteria Evaluasi**

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor - Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, Hal.610

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.

d. Pendekatan evaluasi.

Secara spesifik, Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

1) Evaluasi Semu.

Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak controversial.

2) Evaluasi Formal.

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target

diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk menghasilkan informasi yang valid dan data dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikkan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe criteria evaluative yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.

### 3) Evaluasi Keputusan Teoritis.

Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori

keputusan di satu sisi, evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang membuat andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

e. Tahapan dan kendala Evaluasi kebijakan

Menurut Edward A. Suchman mengemukakan ada enam langkah praktis dalam evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standardisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak



Evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut. Anderson dalam Winarno mengidentifikasi enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan.

1) Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan.

Bila tujuan-tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan.

2) Kausalitas.

Terdapat kesulitan dalam melakukan penentuan kausalitas antara tindakan-tindakan yang dilakukan terutama dalam masalah-masalah yang kompleks. Seringkali ditemukan suatu perubahan terjadi, tetapi tidak disebabkan suatu tindakan atau kebijakan.

3) Dampak kebijakan yang menyebar.

Tindakan-tindakan kebijakan mungkin mempengaruhi kelompok-kelompok lain selain kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini sebagai akibat dari eksternalitas atau dampak yang melimpah yakni dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan atau kelompok selain mereka yang menjadi sasaran kebijakan.

4) Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data.

Kekurangan data statistik dan informasi-informasi lain yang relevan akan menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan.

5) Resistensi pejabat.

Para pejabat pelaksana program mempunyai kecenderungan untuk tidak mendorong studi-studi evaluasi, menolak memberikan data, atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap.

6) Evaluasi mengurangi dampak.

Berdasarkan alasan tertentu, suatu evaluasi kebijakan yang telah dirampungkan mungkin diabaikan atau dikritik sebagai evaluasi yang tidak meyakinkan. Hal inilah yang mendorong mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak mendapat perhatian yang semestinya bahkan diabaikan, meskipun evaluasi tersebut benar

## **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai pembangunan pantai Parangtritis namu memiliki tema, tujuan dan indikator yang berbeda :

Efektivitas program penataan kawasan pariwisata pantai

Parangtritis Kabupaten Bantul, Penulis Annihayah, Pembimbing: Prof. Dr.

Yeremias T. Keban, S.U., MURP :

Kawasan pariwisata pantai Parangtritis merupakan icon utama pariwisata yang menarik minat wisatawan domestik maupun asing. Namun sejak 2004 terlihat tren kunjungan wisatawan yang terus menurun, seiring dengan kondisi kumuh kawasan dan di sebagian kecil lokasi menjadi ajang kegiatan prostitusi. Guna mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sejak 2004 melaksanakan penataan kawasan ini, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati No. 127/2004 tentang Rencana Teknis Obyek Wisata Pantai Parangtritis. Adapun tujuan program ini adalah untuk: meningkatkan kualitas fisik dan lingkungan kawasan obyek wisata Parangtritis; mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan terhadap sumberdaya yang ada di kawasan obyek wisata Parangtritis; meningkatkan iklim investasi dan pemberdayaan masyarakat; serta mengembangkan potensi kepariwisataan kawasan obyek wisata Parangtritis sehingga mampu tumbuh dan berkembang sebagai tujuan wisata yang mempunyai daya tarik khusus dan memiliki peran serta yang strategis bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas program penataan kawasan ini. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah stakeholders yang terdiri atas Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator efektivitas Gibson (1993) yang meliputi produktivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan, pelaksanaan program penataan kawasan pariwisata pantai Parangtritis sampai saat ini belum efektif, karena tingkat pencapaian tujuan program sebesar 47,14%. Secara parsial, pencapaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan iklim investasi & pemberdayaan masyarakat belum efektif. Sementara pencapaian tujuan preservasi lingkungan dan budaya serta pengembangan potensi kepariwisataan telah efektif. Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan iklim investasi serta upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan melalui penertiban bangunan liar secara terus menerus.

Selain itu, terdapat juga penelitian lain yaitu mengenai Dampak sosial, ekonomi dan budaya industri pariwisata Parangtritis. Penulis Torrido, Aryan. Pembimbing: Dra. Agnes Sunartiningsih, MS:

Pengembangan pariwisata di suatu daerah merupakan suatu kegiatan yang bersifat lintas sektoral karena menyangkut banyak aspek dari kehidupan manusia, sehingga pengembangan pariwisata pada akhirnya akan menimbulkan dampak pada penduduk lokal. Penelitian ini beranjak dari keingintahuan tentang kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengembangan pariwisata serta dampaknya terhadap penduduk lokal. Permasalahan penelitian fokus pada tiga hal, yaitu (1) bagaimana bentuk keterlibatan penduduk, (2) dampak sosial ekonomi dan budaya khususnya pada pergeseran okupasi dan tradisi gotong royong, dan (3) bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam kegiatan pariwisata. Daerah yang diamati adalah daerah wisata di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian adalah tokoh formal masyarakat yang dipilih secara purposive, yaitu pengurus desa dan pengurus dusun yang diketahui paling banyak tahu tentang kegiatan pariwisata. Tokoh informal masyarakat serta pelaku kegiatan pariwisata, juga diambil sebagai informan, yang dalam hal ini ditentukan dengan cara snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Parangtritis berjalan signifikan semenjak tahun 1990, setelah adanya pembangunan infrastruktur sebagai realisasi dari program nasional Visit Indonesian Year 1991. Pengembangan pariwisata telah membuka peluang-peluang baru sehingga mendorong keterlibatan penduduk desa dalam kegiatan pariwisata tersebut. Bentuk keterlibatan masyarakat Parangtritis ini terdapat pada peran serta mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi dan keikutsertaan dalam menjalankan program pemerintah di bidang pariwisata secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain pengembangan pariwisata ini telah menimbulkan dampak sosial ekonomi, yaitu pada pergeseran okupasi yang kemudian menimbulkan pergeseran struktur perekonomian dari struktur pertanian ke struktur perdagangan dan jasa. Dampak tersebut khususnya terjadi di Dusun Mancingan sebagai pusat kegiatan pariwisata, belum melibatkan semua dusun yang ada di Desa Parangtritis. Dampak pariwisata ke dusun-dusun lain semakin kecil jika letaknya semakin jauh dari Dusun Mancingan. Secara sosial budaya, perubahan yang terjadi adalah pada kegiatan gotong royong yaitu

pada pola pelaksanaan dan artikulasi yang berbeda di masyarakat Dusun Mancingan dan Depok khususnya. Dampak lain terlihat dengan munculnya inovasi kultural oleh masyarakat Dusun Mancingan, hal mana dapat dilihat sebagai wujud kesadaran penduduk akan pentingnya pariwisata dalam kehidupan mereka. Di samping itu pengembangan pariwisata telah me ningkatkan jumlah perempuan PSK yang berdampak negatif pada moralitas anak dan remaja desa. Kebijakan pariwisata oleh pemerintah telah mendorong keterlibatan warga desa, baik dalam bidang perdagangan, jasa mau pun dalam pelaksanaan program Sapta Pesona. Namun kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan dan pelestarian obyek wisata di Parangtitis masih bersifat normatif, dalam arti implementasi di lapangan belum kelihatan kuat.

Yang terakhir penelitian Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekowisata di destinasi pariwisata kawasan wisata Parangtritis. Penulis Efendi, Fajarianto. Pembimbing: Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si :

Paradigm of policies, programs, and activities to empower society in Parangtritis area as a tourism destination has an accurate and tactical model of approach through the approach pattern of combination of nets of collaborative and participative partnership s that orients to each and multi sectors inside it partnerships. This discourse illustrates the relationship of efforts between all of the stakeholders to support productively the growth and progress of tourism industrial activities of area and to create the sustainability. This model of approach also reflects a synergic coalition between local government, private sectors, and local people in the framework of collaborative performance through participative partnership for all of the stakeholders as a “strategic alliance” to create it directions and achievements that contain the characteristics of feelings of justice, generalization, equality, and balance in it several aspects. The policies of tourism development emphasized in empowering the local society based on the community can show the comparative excellences that will be created, and can cause the multiplier effe cts in the dimensions of economy, social, culture, and environment. It is as a discourse to develop the paradigm of good governance inside the efforts to create a strengthening of the root of civil society to achieve self-supporting society and area. Policies of developing sustainable eco-tourism, as a green industry in the paradigm of developing tourism destination in Parangtritis area, have strategic target in

planning and managing all potencies and excellences of it supporting abilities. It will be meaningful and better if the development is run harmonically by using the patterns that have the vision of environment, and the programs of empowering society based on the community as a part of integrated planning of developing the village. It also notice the necessity to understand the characteristics of nature, environment, and social, culture of local society, and also the limitation of several potencies of the object and its attraction of tourism (ODTW). It is the orientation to guard and maintain the sustainability and continuity all of the potencies and excellences of it supporting abilities to be empowered optimally. Therefore, a tourism destination will be able to be maintained in its exotic image and its comparative excellences that will enhance the quality of ODTW and the attraction of tourism, and can attract a particular enthusiasm for the tourists. It also can create its image and initiate the motivations of the tourists to come to this tourism destination. The key words: policies of empowering the society, developing ecotourism, green industry, stakeholders, combination of nets of collaborative and participative partnerships, participation, strategic alliance, multiplier effects, civil society, and good governance.

## **G. Definisi konseptual**

Penelitian ini memiliki tiga definisi konseptual, yaitu:

1. Kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah jalan menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Kebijakan publik dapat ditempatkan sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional”.
2. Implementasi kebijakan adalah kebijakan pada prinsipnya adalah sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

3. Evaluasi kebijakan adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk memperhitungkan, mengendalikan dan meramalkan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, berupaya peningkatan keberhasilan program.

#### **H. Definisi Operasional**

Indikator untuk Analisa Evaluasi Kebijakan Penataan kembali kawasan objek pariwisata pantai Parangtritis adalah:

1. Rencanaan kebijakan. Rencanaan kebijakan adalah serangkaian kumpulan rencana-rencana yang berisi latar belakang masalah, tujuan, proses, sasaran dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
2. Implementasi. Implementasi adalah penerapan suatu kebijakan yang telah tersusun dalam rencana kebijakan.
3. Efektivitas. Adalah apakah suatu kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut.

4. Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
5. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
6. Perataan. Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
7. Responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
8. Ketepatan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## **I. Metodologi Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah :”penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data-data yang



dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis” (surachmad,1980:33 dalam annihayah, 2008).

Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan bagai mana evaluasi kebijakan/progran/kegiatan penataan kembali objek pariwisata Pantai Parangtritis saat ini paska tsunami tahun 2006 yang di tercantum pada perbaharuan RTOW pada tahun 2007.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Hal ini di karenakan penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta.

## **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan kawasan objek wisata Pantai Parangtritis di Desa Parangtritis, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih penulis karena daerah tersebut merupakan salah satu ikon pariwisata di Yogyakarta yang sangat terkenal dan berpotensi.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Seperti: wawancara, observasi, dokumentasi.

b. Data sekunder

data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Seperti: literatur-literatur, perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, koran dan buku.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi pustaka

Bersumber dari literatur-literatur dan buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian penulis. Seperti:

b. Penelitian lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke obyek penelitian dan selanjutnya melakukan pengamatan. Penulis langsung mendatangi kawasan objek pariwisata Pantai Parangtritis dan melakukan pengamatan sesuai dengan fakta di lapangan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber. Diantaranya adalah pengunjung di Pantai Parangtritis, pedagang di kawasan Pantai Parangtritis dan pembuat kebijakan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian. Dokumentasi yang penulis lakukan seperti pengambilan gambar dan kutipan artikel/ undang-undang/literatur yang terkait dengan tema penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis model interaktif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, memiliki komponen yang harus dilalui, yaitu:

1. Pengumpulan data.
2. Reduksi data.
3. Sajian data.
4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi.